



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Pansus Relokasi PKL DPRD Kota Jogja Peroleh Sejumlah Temuan

Dorong Kolaborasi Pemda DIY dan Pemkot Promosikan Teras Malioboro

Panitia Khusus (Pansus) Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dibentuk DPRD Kota Jogja. Hasilnya setelah bekerja beberapa waktu, pansus memperoleh sejumlah temuan. Di antaranya, adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dialami beberapa pedagang.



DI KEPATIHAN: Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menerima audiensi pimpinan dan anggota Pansus Relokasi PKL yang dibentuk DPRD Kota Jogja. Ada beberapa temuan disampaikan pansus.

"KAMI temukan itu khususnya PKL yang menggantikan orang tuanya yang meninggal. Saat balik nama, mereka dipungut biaya di atas Rp 5 juta," ujar Anggota Pansus R. Krisma Eka Putra kemarin (28/6).

Pungutan itu terjadi pada PKL yang menempati Teras Malioboro 2 di Jalan Malioboro. Tepatnya eks Dinas Pariwisata DIY atau utara gedung DPRD DIY. Dari hasil pelacakan pansus, pungutan tidak dilakukan Dinas Kebudayaan Kota Jogja maupun UPT Malioboro sebagai pihak pengelola. "Sebab memang tidak butuh biaya untuk balik nama," katanya. Pungutan diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan paguyuban pedagang. Pansus juga mendapatkan laporan adanya pengurus paguyuban yang meminta lapak lebih dari satu tempat.

Pansus juga menemukan bagian tengah dari Teras Malioboro 2 seharusnya untuk jalur pengunjung. Namun karena jumlah pedagang membengkak, sebagian dari mereka menempati jalur tersebut. Akibatnya saat turun hujan, mereka mengalami tampias. Dagangan mereka ikut basah. Temuan lain terkait dengan sirkulasi pengunjung.

Pansus menilai perlu ada evaluasi dan peninjauan ulang. Alasannya dengan pola

sekarang, ada sebagian pedagang yang lokasinya jarang dilewati pengunjung. "Kita bisa meniru sirkulasi yang ada di Taman Wisata Borobudur. Penataannya cukup baik," puji sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja ini.

Selanjutnya pansus juga minta agar penempatan pedagang kuliner di sisi utara ditinjau kembali. Alasannya terlalu dekat dengan pedagang pakaian. Efeknya, dagangan pakaian kerap terkena asap.

Temuan lainnya menyangkut promosi. Ada laporan angkutan pariwisata yang menyampaikan informasi tidak benar. PKL Malioboro disebutkan telah bubar. Padahal faktanya mereka direlokasi di

Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Segala informasi dan temuan pansus itu beberapa waktu lalu disampaikan ke Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji. Ada pertemuan khusus yang berlangsung di kompleks Kepatihan. Atas temuan itu, Sekda bisa memahami. Selain itu, Sekda berjanji menindaklanjutinya. "Sebagai bahan evaluasi," katanya.

Pansus dalam kesempatan itu juga minta agar promosi soal Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 diintensifkan. Dia minta antara Pemda DIY dan Pemkot Jogja saling mengadakan sinergi dan kolaborasi. Tanpa dua hal itu, maka persoalan tidak dapat tuntas. (kus/by)



EVALUASI: Anggota Pansus Krisma Eka Putra mengusulkan beberapa perubahan dalam penataan pedagang di Teras Malioboro.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005